



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Trans Sulawesi Desa Lolak

Kecamatan lolak 95761

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2025

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 terlaksana sesuai jadwal.

Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow. Isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 kami sampaikan untuk diperiksa. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberi manfaat, amien.

Lolak, Januari 2026

KEPALA DINAS PP DAN PA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DR. HC. Ramlah, SE, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661005 199403 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM	6
1.1 DATA UMUM ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6
1.1 PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PERENCANAAN STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	14
C. REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025	15
BAB III AKUTANBILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. PENGUKURAN KINERJA	17
i. Metode Pengukuran Kinerja	17
ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	18
B. REALISASI ANGGARAN	37
1. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan	37
BAB IV PENUTUP	39
A.Tinjauan Umum	39
B.Permasalahan dan Strategis Pemecahannya	39

DAFTAR TABEL

Halaman	
<i>Tabel 1. 1 Struktur Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	8
<i>Tabel 1. 2 Daftar pangkat/golongan, kualifikasi pendidikan, jabatan.</i>	9
<i>Tabel 1. 3 Daftar Honorer/ Jasa Administrasi.</i>	9
<i>Tabel 1. 4 Daftar Inventaris Barang Tahun 2025</i>	10
<i>Tabel 2. 1 Target Tujuan sasaran Jangka Menengah Dinas PP dan PA</i>	14
<i>Tabel 2. 2 Revisi perjanjian Kinerja</i>	15
<i>Tabel 2. 3 Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)</i>	16
<i>Tabel 3.1.1 Perhitungan IPG Tahun 2025</i>	20
<i>Tabel 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024</i>	21
<i>Tabel 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja</i> <i>tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2025</i>	22
<i>Tabel 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini</i> <i>dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen</i> <i>Renstra</i>	23
<i>Tabel 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar</i> <i>nasional</i>	23
<i>Tabel 3.2.1 Data Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tahun 2025</i>	26
<i>Tabel 3.2.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025</i>	27
<i>Tabel 3.2.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja</i> <i>tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2025</i>	27
<i>Tabel 3.2.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini</i> <i>dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen</i> <i>Renstra</i>	28
<i>Tabel 3.2.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar</i> <i>nasional</i>	29
<i>Tabel 3.3.1 Tabel nilai Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2025</i>	31
<i>Tabel 3.3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025</i>	32

<i>Tabel 3.3.3</i>	<i>Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2025</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3.3.4</i>	<i>Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 3.3.5</i>	<i>Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 3.3.6</i>	<i>Hasil capaian kinerja pada Sasaran dapat dilihat pada.</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3.3.7</i>	<i>Realisasi Fisik dan Keuangan.</i>	<i>37</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow adalah unsur perangkat daerah yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan kedudukan susunan organisasi serta menjalankan fungsi organisasi serta dapat melaksanakan dan merumuskan kebijakan serta menjalankan administrasi sesuai tugas dan tanggungjawab.

Satuan kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow adalah unsur organisasi perangkat daerah yang dapat memwadahi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perdamaian

Adapun Komitmen Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Hak asasi manusia, Undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial, dan Budaya, dan Undang-undang. Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah dokumen satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum sekaligus bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai program kerja tahun 2025.

I.1. DATA UMUM ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BOLAANG MONGONDOW.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow terbentuk sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah ditetapkan kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B. Terdiri Dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan :
 - Penggerak swdaya Masyarakat
4. Bidang Perlindungan Anak
 - Penggerak swdaya Masyarakat
5. Bidang Perlindungan Perempuan;
 - Penggerak swdaya Masyarakat

a. Status Kepegawaian

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan status ASN berjumlah 12 orang terdiri dari :

- | | |
|--------------|-------------|
| a. Laki-laki | = 6 Pegawai |
| b. Perempuan | = 8 Pegawai |

Kualifikasi Pendidikan Yaitu :

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Sarjana S1 | = 11 Orang |
| 2. Tingkat SMA/SMK | = 3 Orang |

Jabatan Pegawai Yaitu :

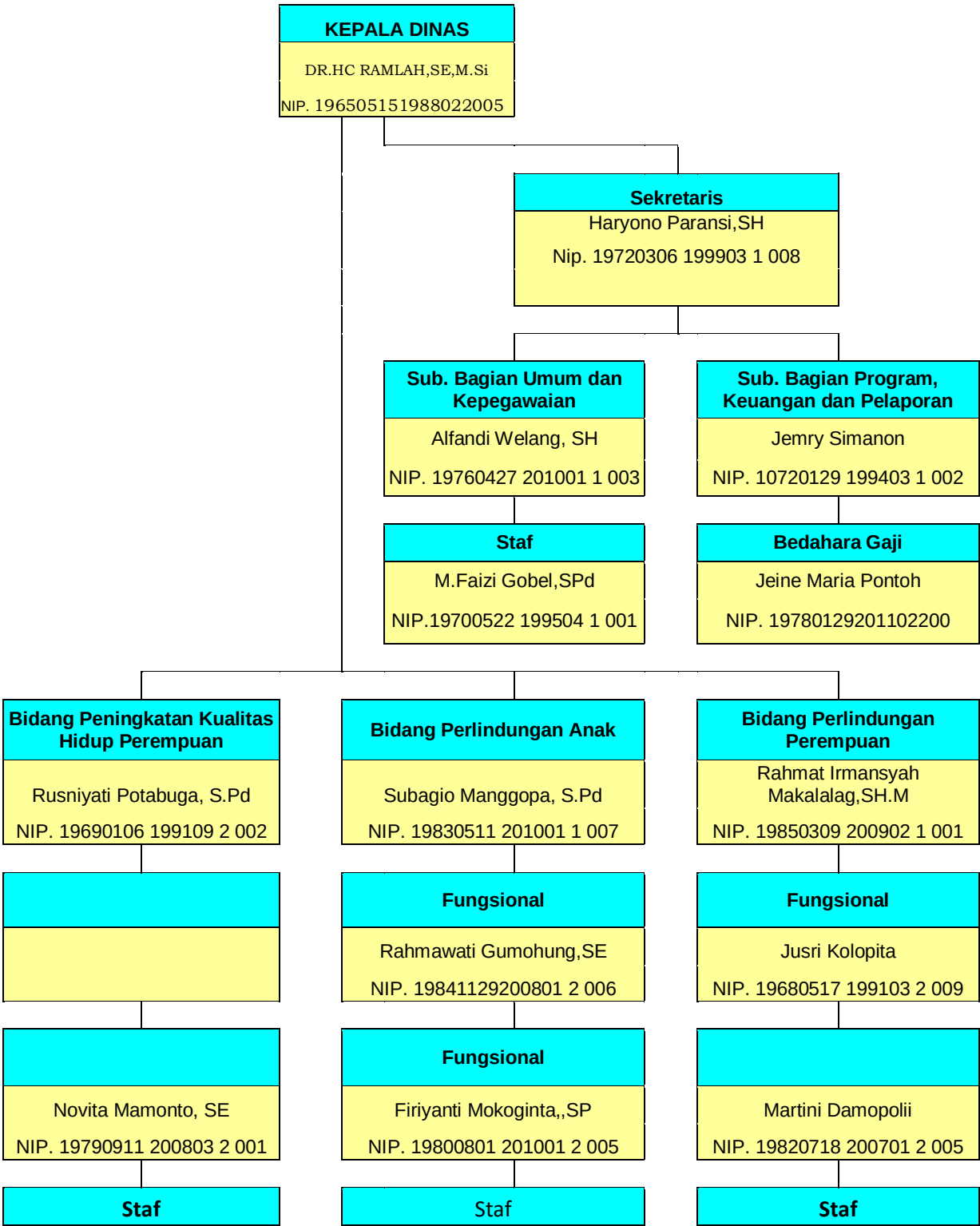
- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Kepala Dinas | = 1 Orang |
| 2. Sekretaris | = 1 Orang |
| 3. Kepala Bidang | = 3 Orang |
| 4. Kasubag | = 2 Orang |
| 5. Jabatan Fungsional | = 3 Orang |

Pangkat dan Golongan Yaitu :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Pembina Utama IV/c | = 1 Orang |
| 2. Pembina Tkt I IVb | = 2 Orang |
| 3. Pembina, Iva | = 3 Orang |
| 4. Penata Tkt I, IIIId | = 6 Orang |
| 5. Penata, IIIc | = 1 Orang |
| 6. Pengatur Tkt 1, IIId | = 1 Orang |

Total	= 14 Orang sesuai Tabel Berikut :
-------	-----------------------------------

Tabel . 1.1
STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tabel 1.2

**DAFTAR PANGKAT/GOLONGAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN
STATUS JABATAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jabatan
1.	DR. HC. Ramlah SE, M.Si 19661005 1994032005	Pembina Utama Muda, IV/c	Magister Manajemen	Kepala Dinas
2.	Haryono Paransi, SH 19720306 199903 1 008	Pembina Tkt. I, IV/b	Sarjana Hukum	Sekretaris
3.	Rahmat Irmansyah Makalalag,SH.M 19850309 200902 1 001	Pembina Tkt. I, IV/b	Sarjana Hukum	Kabid Perlindungan Perempuan
4.	Subagio Manggopa, S.Pd 19830511 201001 1 007	Pembina Tkt. I, IV/a	Sarjana Pendidikan	Kabid Perlindungan Anak
5.	Rusniyati Potabuga, S.Pd 19690106 199109 2 002	Penata Tkt I, IV/a	Sarjana Pendidikan	Kabid Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
6.	Jemri Simanon, SE 19720129 199403 1 002	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Ekonomi	Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan
7.	Alfandy Welang,SH 19760427 201001 1 003	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Hukum	Kasubag Kepegawaian
8.	Rahmawati Gumohung, SE 19841129 200801 2 006	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Ekonomi	Fungsional
9.	Fitriyanti Mokoginta, SP 19800801 201001 2 005	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Pertanian	Fungsional
10	Jusri Kolopita 19680517 199103 2 009	Penata Tkt I, III/d	SMA	Fungsional
11.	M. Fauzi Gobel. S.Pd. MSi 19851020 201001 2 002	Pembina, IV/a	Magister Sains	Staf
11.	Novita Mamonto, SE 19790911 200803 2 001	Penata Tkt I, III/d	Sarjana Ekonomi	Staf
12.	Jeine Maria Pomto 197801292011022001	Pengatur TkT I, IId	SMA	Staf
13.	Martini Damopolii 19820718 200701 2 005	Pengatur Tkt I, II/c	SMK	Staf

Tenaga Honorer terdiri dari 1 Sopir Kepala Dinas, 1 Orang Klining Serfis, 2 Orang dan Penjaga Kantor. Terdiri dari sesuai tabel :

Tabel 1.3

**DAFTAR HONORER / JASA ATMINISTRASI TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Trisutrisno Saputra Suid	Sopir Tenaga Oprerasional	Tenaga Honorer
2.	Nadia Natunggele	Petugas Kebersihan	Tenaga Honorer
3.	Renaldi Abiidin	Penjaga Kantor	Tenaga Honorer
4.	Aurelia S Putri Kalembe	Penjaga Kantor	Tenaga Honorer

b. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Perencanaan Pembangunan yang telah tersedia pada tahun 2025 adalah

Tabel 1.4

**DAFTAR INVENTARISTAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN A**

No	Jenis Barang/	Jumlah	Tahun	Keadaan Barang			Ket
	Nama Barang	Barang	Perolehan	B	KB	RB	
A	Alat-alat angkutan						
1	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	2010	1			
		1 Unit	2018	1			
2	SepedaMotor	1 Unit		1			
B	Alat Komputer						
1	Laptop/Notebook	2 Unit	2018	2			
2	Laptop	1 Unit	2017	1			
3	Printer	3 Unit	2017	3			
C	Alat Studio						
1	LCD Proyektor dan Layar	1 Unit	2018	1			
2	LCD TV 42 Inch	1Unit	2018	1			
3	Keyboard PSR 770	1Unit	2018	1			
4	Mixer Yamaha MG10KU	1 Unit	2018	1			
5	Power	1 Unit	2018	1			
6	Speaker Standing/Tiang 15 Inch	1 Unit	2018	1			
8	Keyboard PSR 770	1 Unit	2018	1			
D	Pengadaan Alat Dapur						
1	Dispenser	1Unit	2018	1			
2	Blender	1 Unit	2018	1			
3	Mixer	1 Unit	2018	1			
5	Kompor Gas Dua Tungku	1 Unit	2018	1			
6	Tabung Gas 5 Kg	1Unit	2018	1			
7	Wajan Sedang	1 Unit	2018	1			
8	Penanak Nasi	1 Unit	2018	1			
D	Pengadaan Alat Kantor						
1	Meja Kerja Pimpinan 1 Biro	1 Unit	2017	1			
2	Meja Kerja 1 Biro	4Unit	2017	4			
3	Meja Kerja 1/2 Biro	12 Unit	2017	12			
4	Kursi Kerja Pimpinan (Besar)	1 Unit	2017	1			
5	Kursi Kerja Pimpinan (Kecil)	10 Unit	2017	10			
6	Kursi Tamu Kayu	1 Set	2017	1			
7	Kursi Plastik	24 Unit	2017	24			
8	Lemari Arsip Kayu	2 Unit	2017	2			
9	Lemari Arsip Besi	3 Unit	2017	3			
1	Filling Kabinet	3 Unit	2017	3			
1	AC Standing Floor	1 Unit	2017	1			
1	Kipas Angin	5 Unit	2017	5			
1	PC AIO	3 Unit	2017	3			

Keterangan :

	B	: Baik
	KB	: Kurang Baik
	RB	: Rusak Berat

1.2 PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Terkait Kesetaraan Dan Keadilan Gender:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

b. Permasalahan Terkait Perlindungan Hak Perempuan:

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (TPPO) dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

c. Permasalahan Terkait Perlindungan Anak:

- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti

pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

3) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak anak.

d. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A . PERENCANAAN STRATEGIS

Maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah:

**“Bolaang Mongondow yang baru, Berbudaya,
Berdaya Saing dan Mandiri sebagai Lumbung
Pangan Indonesia Timur”**

Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023- 2026 Yaitu :

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Bertumpu pada Potensi Sumberdaya Lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Lumbungan Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan.

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	• Peningkatan Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	• Pengendalian kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

		• Pengendalian Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Pengendalian perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	• Memaksimalkan berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Pengendalian berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Terpenuhi hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk setiap tahunnya selama empat tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Visi : <i>Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan indonesia timur</i>			
Misi : “ Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing ”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak- Anak (PUHA)	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Hak Perempuan.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	• Peningkatan Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	• Pengendalian kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Pengendalian Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Pengendalian perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran

		Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	• Memaksimalkan berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Pengendalian berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Terpenuhi hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman
--	--	----------------------------------	---

Adapun target Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

Tabel. 2.1

Target Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024	Sasaran	Indikator Sasaran				
						2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)dan Indeks Peremberdayaan Gender (IDG)	80,43 Angka	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	88,42	88,43	88,44	88,45
	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	0,0027 Rasio	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	Rasio Kualitas Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO)	0,0037	0,0027	0,0017	0,0010
	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan Hak Anak Bagi Semua Anak Termasuk Anak berkebutuhan Khusus	Status Penilaian Kabupaten Layak Anak	60,50 Angka	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Status Penilaian Kabupaten Layak Anak	60,30	60,50,	70,20	70,50

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongodnow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025 :

Tabel 2.2
Revisi Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Indeks pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	88,43	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 250.293.418
2	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio Kualitas Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO)	0,0027	1.Program Perlindungan Perempuan.	Rp 216.706.515
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Status Penilaian Kabupaten Layak Anak	60,50	2.Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 76.383.216

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Adapun Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_L} \times 100$	88,44 Angka
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio Kualitas Penanganan kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO)	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan membutuhkan rehabsos}}{10000}$	0,0017 Rasio
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Status Penilaian Kabupaten Layak Anak	Score Penilaian kabupaten/kota Layak Anak oleh Kementrian	70,20 Angka

Gambaran secara utuh bagaimana Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

BAB III

AKUNTA BILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

i. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- c) tingginya kinerja, digunakan rumus:

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan(PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

ii. *Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran*

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Sangat Berhasil :	92,5
Berhasil :	77,5
Cukup Berhasil :	62,5
Tidak Berhasil :	27,5

A. Meningkatnya Capaian Indeks pembangunan Gender

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah

Pengukuran capaian kinerja sasaran : “Meningkatnya capaian Indeks pembangunan Gender (IPG) dan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

sebagai berikut:

Perolehan IPG di dapat dari perhitungan jumlah IPM Perempuan dibagi IPM laki-laki dan di kali 100. Jadi untuk menghitung IPG nya Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tabel Berikut :

Tabel : 3 . 1.1

PERHITUNGAN IPG TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

IPM		IPG
L	P	L/P
73,80	65.77	89.12%

Sumber Data BPS Provinsi Sulut Tahun 2024

[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara (UHH Menggunakan Hasil Sensus penduduk 2010)			
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
	2024	2024	2024
Sulawesi Utara	78,11	74,58	75,03
Bolaang Mongondow	73,80	65,77	70,29
Minahasa	79,85	77,36	77,74
Kepulauan Sangihe	74,70	71,58	72,71
Kepulauan Talaud	72,75	71,44	71,77
Minahasa Selatan	77,63	69,68	74,17
Minahasa Utara	78,05	75,41	75,32
Bolaang Mongondow Utara	73,73	64,78	69,32
Kepulauan Sitaro	74,35	66,50	70,31
Minahasa Tenggara	75,93	70,49	72,32

blob:https://web.whatsapp.com/6b3e92c0-abba-4e5d-ad54-c004055efa3c

Dari tabel di atas kita bisa menghitung IPG kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yaitu :

$$\text{IPG} = \frac{65.77}{73,80} \times 100$$
$$\text{IPG} = 89,12$$



Rapat Kesetaraan Gender

Semua Capain diatas Indeks Pembangunan Gender (IPG) kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025, itu diambil dari IPM Perempuan dan IPM Laki-laki pada tahun 2023 yang perhitungannya dari :

- a. Umur harapan Hidup
- b. Harapan Lama Sekolah.
- c. Rata-rata lama sekolah dan
- d. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

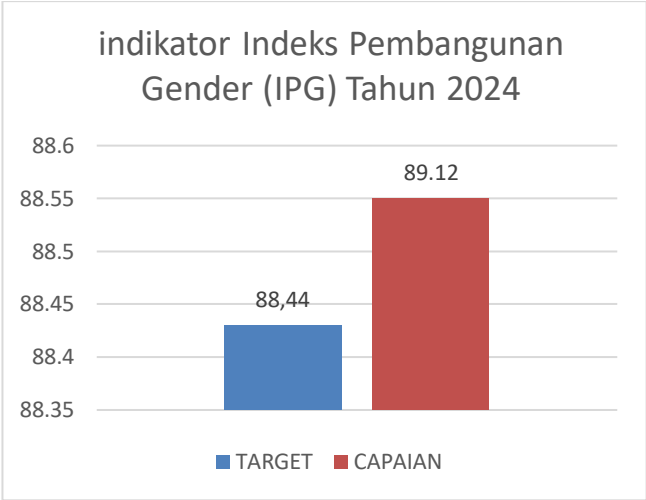
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	89.12% *(data tahun 2024)	99,23

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Tabel diatas Pada Tahun 2024 di ambil dari perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)) pada tahun 2024 Dari Target **88,44** terealisasi sebesar **89.12** dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah **99,23**.



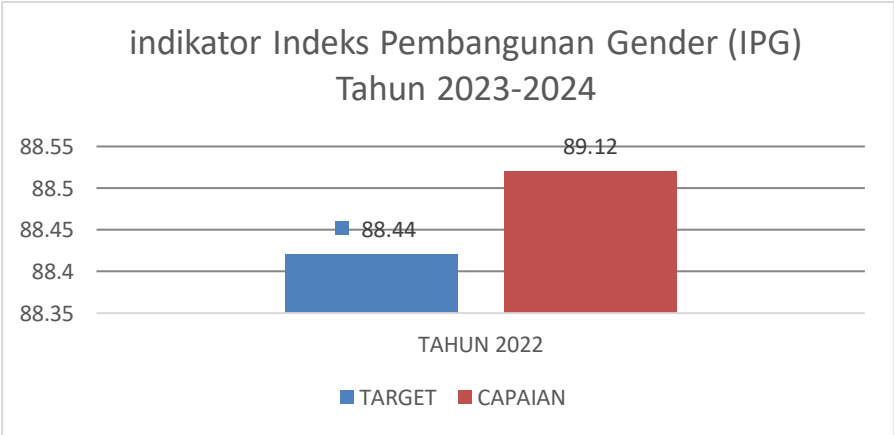
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2023-2024

No	INDIKATOR	2023			2024			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.42	88.55	100.14	88.44	89.12	99,23	88.45
RATA RATA CAPAIAN		100.14			99,23			

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Tabel diatas Pada beberapa Tahun Terakhir. Pada Tahun 2024 dari perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan pada tahun 2024 Dari Target **88.44** terealisasi sebesar **89,12** dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah **99,23** dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 Target 88,42 terealisasi **88,55** capaian Kinerja terealisasi sebesar **100,14**



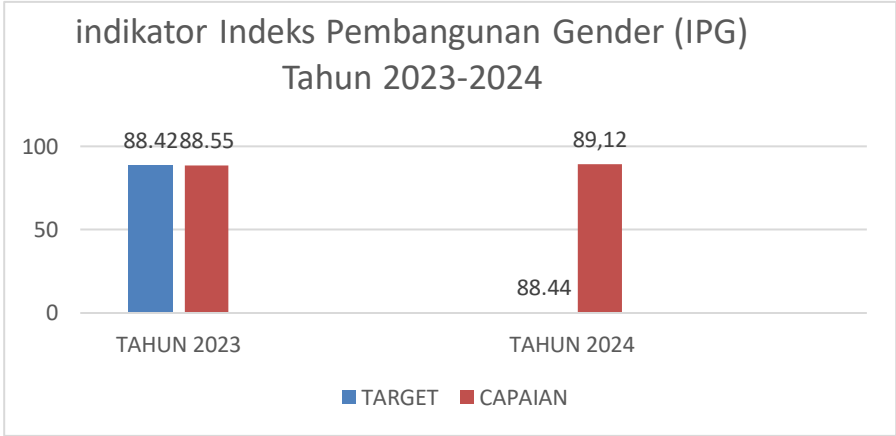
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.1.4

Membandingkan realisasi Data Indeks Pembangunan Gender IPG
Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Terhadap Target	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,42	88,44	89,12	99,23	88,44	88,45

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023-2024 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2024 sebesar **88,44**, Capaian Tahun 2024 sebesar **89,12**, Capain Kinerja terhadap Akhir Renstra sebesar 99,23 % berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023-2024 tiap Tahun Capaian Kinerja Naik.



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.1.5

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

NO	INDIKATOR	Kabupaten	Provinsi	Nasional
	indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,12	95.05	91,85

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar **89,12**, Propinsi Sulawesi Utara sebesar **95,05**, Nasional sebesar **91,85** berdasarkan Hasil Perbandingan diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG)) Tahun 2023-2026 tiap Tahun Capaian Kinerja Naik.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dapat Dilihat pada Tahun 2024 Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai **89,12** untuk capaian Kinerja Melebihi Target Hal ini disebabkan.

- 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 3. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 4. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 5. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian realisasi Anggaran	Capaian efesiensi sumber daya
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,23	65,25	65,75

Dari hasil analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah **99,23** dikurangi capaian realisasi Anggaran **65,25** dan menghasilkan hasil capaian efisiensi sumber daya menjadi **65,75**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Dari hasil capaian Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah :

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan

kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota dengan Anggaran RP **250,000,000** Realisasi Rp. 250,000,000 dengan capaian **100%**, maka perlu di sampaikan masih perlu penambahan Anggaran untuk pencapaian pernyataan kinerja Tahun berikutnya.

B. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dengan Indikator Sasaran Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO.

Pengukuran capaian kinerja sasaran : “Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dengan Indikator Sasaran Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO dengan indikator Jumlah Penanagan Kasus Kerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO sebagai berikut:

Kasus Kekerasan terhadap =
Perempuan

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan
rehabsos

Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan
rehabsos



Musyawarah Nasional Perempuan

Tinginya kasus kekerasan terhadap perempuan terlihat dari jumlah kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO dan jumlah kasus KDRT.

Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentang terhadap kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

Tabel : 3 . 2.1

DATA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN TAHUN 2025

No.	Jenis Kasus		Jumlah Korban
A.	Korban Kekerasan yang Membutuhkan Rehabsos		
a	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)		
1	FISIK		3
2	PHISIKIS		0
3	SEKSUAL		4
4	PENELANTARAN		4
5	EKSPLOITAASI		0
6	TRAFICING		0
7	LAINNYA :		0
JUMLAH			11
B	korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos Bolmong		
1	FISIK		0
2	PHISIKIS		0
3	SEKSUAL		0
4	PENELANTARAN		0
5	EKSPLOITAASI		0
6	TRAFICING		0
7	LAINNYA :		0
JUMLAH			0

Sumber Data Dinas PP dan PA

Dari tabel di atas kita bisa menghitung Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 yaitu :

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

11

10000

=

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

=

0,0011

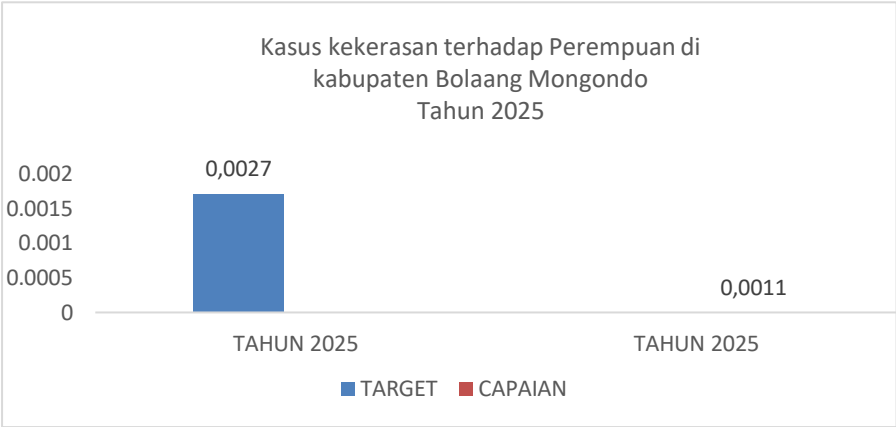
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.2.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rasio Kualitas Penanganan Kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO	0,0017	0,0011	64,70%

Dari hasil Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondo Tabel diatas Pada Tahun 2025 dari perhitungan Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 Dari Target **0.0017** terealisasi sebesar **0,0011** dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah **64,70**.



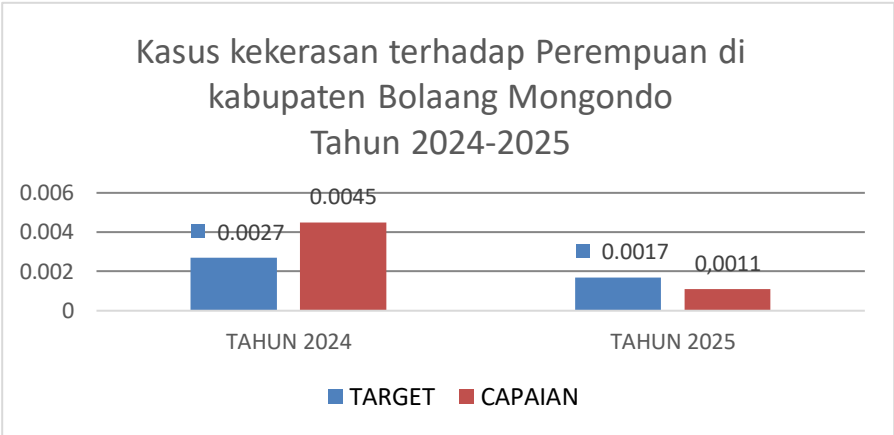
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2025

	INDIKATOR	2023			2024			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Rasio Kualitas Penanganan Kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO	0,0027	0,0045	60%	0,0017	0,0011	64,70 %	0,0010
RATA RATA CAPAIAN		60%			64,70 %			

Dari Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondo Tabel diatas Pada Tahun 2025 dari perhitungan I Kasus kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2024 Dari Target **0,0027** terealisasi sebesar **0,0045** dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah **60%** dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 Target **0,0017** dan Realisasi sebesar **0,0011** namun untuk capaian Kinerja terealisasi sebesar **64,70%**



3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.2.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target	
		Target	Realisasi	Capaia	Target	Realisasi
Rasio Kualitas Penanagan Kerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO	60%	0.0017	0,0011	64,70%	0,0017	0.0010%

Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondo) Tahun 2023-2026 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2024 sebesar 60%, dan Target **0.0017** , Realisasi **0,0011** dan untuk Capaian Tahun 2025 sebesar **64,70%** Capain Kinerja terhadap Akhir Renstra sebesar 0,0010% berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 tiap Tahun Capaian Kinerja Turun.



4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel 3.2.5
Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

NO	INDIKATOR	Kabupaten	Provinsi	Nasional
1	Rasio Kualitas Penanagan Kerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO	0,0017	15,20	43,41

Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondo) Tahun 2023-2026 Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar **0,0017**, Propinsi Sulawesi Utara sebesar **15.20**, Nasional sebesar **43.41**, berdasarkan Hasil Perbandingan diatas dapat diketahui Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondo) Tahun 2023-2026 tiap Tahun Capaian Kinerja Turun.

5. **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dapat Dilihat pada Tahun 2025 Kasus kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 mencapai **0,0017** untuk capaian Kinerja Melebihi Target Hal ini disebabkan.

- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- Belum optimalnya penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak anak
- Solusi yang dilakukan oleh Dinas PP dan PA Kab. Bolmong :
 1. Melaksanakan Sosilalisasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Anak di Tingkat Kecamatan dan Desa.

- 2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi tindak kekerasan yang terjadi di kecamatan dan desa.
- 3. Melakukan Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian realisasi Anggaran	Capaian efesiensi sumber daya
Rasio Kualitas Penanagan Kerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO	0.0017	65.25	0.0026

Dari hasil analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah **0,0017** dikurangi capaian realisasi Anggaran **65.254** dan menghasilkan hasil capaian efisiensi sumber daya menjadi **0.0026%**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Dari hasil capaian Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah : Program Program Perlindungan Perempuan.

Program Perlindungan Perempuan dengan Anggaran RP **299.039.355** Realisasi Rp. **200.187.800,00** dengan capaian **66.94%** , maka perlu di sampaikan masih perlu penambahan Anggaran untuk pencapaian pernyataan kinerja Tahun berikutnya.

Dari hasil tersebut maka capaian indikator Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kategorikan “ **Berhasil**“ dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

C. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak

Indikator Sasaran Status Penilaian Kabupaten Layak Anak

$$\text{SkorKLA} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{1000} \times 100$$

dihitung dengan rumus sebagai berikut:



Dari Hasil perhitungan terwujudnya kabupaten layak anak itu telah diatur dan dilaksanakan pemerintah lewat kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak yang

didasarkan atas kerjasama lintas kementerian dan dikerjakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bolaang Mongondow dengan melibatkan lintas SKPD yang terkait dan diperoleh nilai skor untuk terwujudnya Kabupaten layak anak. Dengan melihat nilai skor atau pengisian data klaster Tersebut sesuai tabel berikut

Tabel 3.3.1

Tabel nilai Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai Evaluasi KLA 2024	Skor KLA Bolmog 2024
1	Kelembagaan	164	117.71
2	Klaster I	115	114
3	Klaster II	156	131.20
4	Klaster III	150	123
5	Klaster IV	110	81,40
6	Klaster V	205	205
7	Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa, Kel	100	64.25
	SKOR	1000	836,56

Sumber Data Kementerian PP dan PA 2024

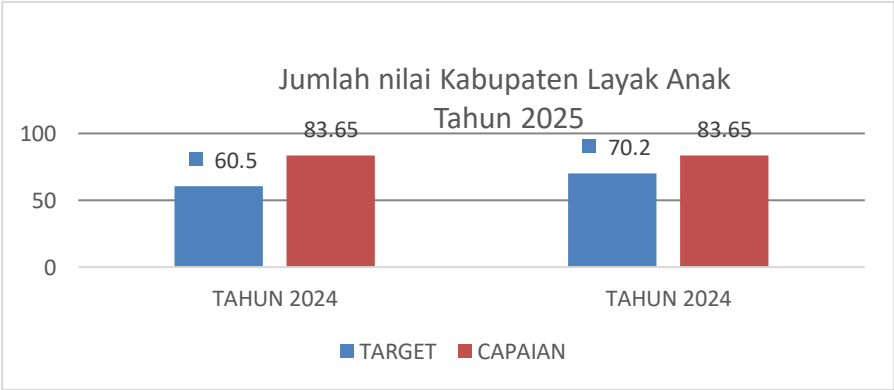
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3.2

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2025

No	INDIKATOR	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya jumlah nilai Kabupaten Layak Anak	60,50	83,65	72,32%	70,20	83,65	83,92%	70,50
RATA RATA CAPAIAN		72,32%			83,92%			

Dari Meningkatnya jumlah nilai Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 Dari Target **70.20** % terealisasi sebesar **83,65** dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah **83,92%** dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 Target **60,30** dan Realisasi sebesar **60,50** namun untuk capaian Kinerja terealisasi sebesar **72,32%**.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3.3

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Status Penilaian kabupaten Layak Anak	72,32	70,20	83,65	83,92%	70,50	84,00%

Meningkatnya jumlah nilai Kabupaten Layak Anak di kabupaten Bolaang Mongondo) Tahun 2023-2026 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2024 sebesar **72,32**, , dan untuk Capaian Tahun 2025 sebesar **83,92** Capain Kinerja terhadap Akhir Renstra sebesar **70.50%** berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten Bolaang Mongondo) Tahun 2023-2026 tiap Tahun Capaian Kinerja Naik.

Capaian indikator dari Jumlah Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) **(83,92)** pada tahun 2025 adalah tingkat kebersihan dari Jumlah nilai Kabupaten Layak Anak (836,56) dibagi dengan jumlah nilai Kabupaten Layak Anak (1000), Jika dibandingkan Jumlah Nilai KLA pada Tahun 2025 yang mencapai (40,10) ada Kenaikan Capaian Kinerja Hal ini dikarenakan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Pemuktahiran Data dengan turun langsung Ke lapangan bersama P2TP2A, Kepolisian, Masyarakat, Desa/Kelurahan, kecamatan dan Intansi terkait sehingga Jumlah Nilai KLA yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow bisa memperoleh pemuktahiran data yang lebih Akurat sehingga bisa memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak dan mendapat sertifikat serta piala Pratama KLA.



4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel 3.3.4
Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Daerah Terdekat

NO	INDIKATOR	Kab. Bolaang Mongondow	Kota Kotamobagu
1	Status Penilaian kabupaten Layak Anak	83,65	92.50

Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bolaang Mongondow dengan capaian **83,65** dibandingkan dengan kota kotamobagu yang mencapai **92,50** masih terbilang rendah tapi penilaian kabupaten layak anak sudah terhitung berhasil sehinga mendapat piagam penghargaan dan piala (Pratama) Tahun 2025.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dapat Dilihat pada Tahun 2025 kabupaten Bolaang Mongondo dalam penilaian Kabupaten Layak anak Tahun 2025 mencapai **83,65** untuk capaian Kinerja sesuai Target Hal ini disebabkan.

- Terlaksanakan kerjasama antar Dinas Badan yang terkait dalam pengimputan KLA
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- Belum optimalnya penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak anak
- Upaya/ Solusi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian indikator ini adalah dengan memperkuat kerja sama antara perangkat daerah kecamatan,desa kelurahan, lembaga masyarakat Dunia Usaha, Lintas Sektor, media, dan Forum anak Daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.3.5
Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian realisasi Anggaran	Capaian efesiensi sumber daya
Status Penilaian kabupaten Layak Anak	83,92	65,25	77,75

Dari hasil analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah **72,32** dikurangi capaian realisasi Anggaran **65,25** dan menghasilkan hasil capaian efisiensi sumber daya menjadi **77.75**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

8.

Dari hasil capaian Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah :

Program Perlindungan Khusus Anak,

- a. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota Dengan

Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Program/ Kegiatan Pencegahan KTA dengan Anggaran RP 48.226.000 Realisasi Rp. 14.421.675 dengan capaian **29.90 %** , **maka perlu di sampaikan masih perlu penambahan** Anggaran untuk pencapaian pernyataan kinerja Tahun berikutnya.

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dengan

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK dengan Anggaran RP 134.100.000 Realisasi Rp. 60.300.000 dengan capaian **44.97 %**, maka perlu di sampaikan masih perlu penambahan Anggaran untuk pencapaian pernyataan kinerja Tahun berikutnya

- c. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dengan

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan

Anggaran RP 49.428.000 Realisasi Rp. 49.428.000 , - dengan capaian 100%, maka perlu di sampaikan masih perlu penambahan Anggaran untuk pencapaian pernyataan kinerja Tahun berikutnya

D. PENYIMPULAN CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN

Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025 dapat dilihat Pada Tabel Berikut :

Tabel 3.3.6

Hasil capaian kinerja pada Sasaran dapat dilihat pada:

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			CAPAIAN KINERJA 2022 (%)
				TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatkan Kesenjangan Gender dalam pembangunan	Meningkatnya Indeks pembangunan Gender	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44 Angka	89.12	99,23%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO	0,0017 Skala	0,0011	64,70%	Cukup Berhasil
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan Hak Anak Bagi Semua Anak Termasuk Anak berkebutuhan Khusus	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya jumlah nilai Kabupaten Layak Anak	70,20 Angka	83,65	83,92%	Berhasil

Dari table diatas dapat dilihat dari tiga sasaran dengan tiga indikator sasaran startegis dengan capaian berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

- a. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Tabel 3.3.7
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
POSISI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	FISIK
1	2	3	4	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.681.801.255,00	2.402.329.739.00	65.25%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.686.569.973,00	1.772.703.998,00	65,98%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.856.886.799,00	1.394.178.719,00	75.08%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.265.360,00	1.358.520.460,00	74,76%	
	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.023.511,00	26.777.724,00	89,19%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.597.928,00	8.880.535,00	92.53%	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.152.500,00	11.475.000,00	81,08%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.152.500,00	11.475.000,00	81,08%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.173.790,00	152.058.197,00	99.27%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.598.613,00	10.322.520,00	97.40%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.575.177,00	141.735.677,00	99.41%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah ...	410.000.000,00	9.984.000,00	2.44%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau B ...	410.000.000,00	9.984.000,00	2.44%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.192.556,00	152.323.314,00	85.48%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.467.948,00	2.901.764,00	38,86%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.724.608,00	65.671.550,00	99.92%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00	83.750.000,00	79.76%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.164.328,00	52.684.768,00	71.04%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.164.328,00	52.684.768,00	71.04%	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	250.000.000,00	250.000.000,00	100%	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	100%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	100%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	299.039.355,00	200.187.800,00	66.94%	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Linkungan daerah Kab/Kota	. 49.623.000,00	6.180.000,00	12.45%	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan program,kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kab./kota	. 49.623.000,00	6.180.000,00	12.45%	
	Peyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab./ kota	81.533.000,00	57.057.800,00	69.98%	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab./Kota	81.533.000,00	57.057.800,00	69.98%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.883.355,00	136.950.000,00,	81.57%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab./Kota	37.750.000,00	17.250.000,00	45.70%	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.133.355,00	119.700.000,00	91.98%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	214.437.927,00	55.288.266,00	25.78%	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214.437.927,00	55.288.266,00	25.78%	

	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	214.437.927,00	55.288.266,00	25.78%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	231.754.000,00	124.149.675,00	53.57%	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	48.226.000,00	14.421.675,00	29.90%	
	Avokasi dan pendampingan Perangkap Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	48.226.000,00	14.421.675,00	29.90%	
	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	134.100.000,00	60.300.000,00	44.97%	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	134.100.000,00	60.300.000,00	44.97%	
	Penguatan dan pengembangan lembaga Peyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.428.000,00	49.428.000,00	100%	
	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.428.000,00	49.428.000,00	100%	
	J U M L A H	3.681.801.255,00	2.402.329.739.00	65.25%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Capaian Indeks pembangunan Gender ialah “ **Berhasil** ” Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 mencapai 65,25 % yang sudah terealisasi.

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

(Menjelaskan beberapa indikator yang belum berhasil mencapai target)

Contoh "Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah “**Berhasil**” akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan, Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO dan Terwujudnya Kabupaten Layak Anak Kab.Bolaang Mongondow belum semuanya memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena Masih banyak tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak belum bisa terjangkau

Untuk indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG), meskipun capaian tahun 2025` sudah melebihi target, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal. Realisasi IPG tahun 2024 ialah 89,12%, dan Capaian kinerja 99,23 % hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten Bolaang Mongondow sudah mendekati kesetaraan. Hal ini diduga disebabkan karena Jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah baik itu pekerja perempuan yang duduk di DPRD keterwakilan 30 % . juga pekerja pada lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta masih di dominasi oleh kaum pekerja laki-laki, perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

- Tersedianya tenaga profesional perempuan.
- Mudahnya akses pekerja perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.
- Terciptanya kelompok usaha perempuan yang profesional

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026.

Lolak, Januari 2026

KEPALA DINAS PP DAN PA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
e/ DR. HC. Ramdiah, SE M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661005 199403 2 005

LAMPIRAN